

ABSTRAK

Pembahasan penelitian ini difokuskan pada pertimbangan kenapa ahli waris pengganti harus dimuat dalam hukum kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, problematika hukum ahli waris pengganti yang belum berkeadilan dalam Hukum Kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum dari penerapan ketentuan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Konstruksi Hukum Islam yang belum berkeadilan, dan rekonstruksi ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Konstruksi Hukum Islam yang berbasis nilai keadilan.

Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari penerapan ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dalam proses Peradilan Agama di Indonesia, yang melahirkan berbagai problematika hukum seperti perbedaan penafsiran terhadap pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengenai ahli waris pengganti, karena redaksinya yang bersifat ambigu dan dianggap rumusnya tidak jelas. Multi tafsir terhadap pasal 185 tersebut mengakibatkan perbedaan signifikan dalam putusan para Hakim Pengadilan Agama.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan paradigma *constructivism*. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normative dan *sociological jurisprudence*. Adapun sumber bahan hukum adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan regulasi-regulasi serta referensi lainnya yang terkait, kemudian dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan.

Temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: dalam aspek filosofis, ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berasal dari kewarisan Islam syafi'iyah, tujuan pembentukannya hanya diperuntukkan kepada para hakim Agama, kemudian epistemologi ahli waris pengganti dihegemoni pemikiran hazairin, hukum adat dan hukum perdata Belanda, kemudian adanya pembatasan penafsiran oleh Mahkamah Agung menjadikan ketentuan ahli waris pengganti menjadi kabur. Temuan aspek sosiologis adalah bahwa mindset mayoritas muslim Indonesia berdasarkan mazhab syafi'iyah dimana mazhab ini tidak mengenal istilah ahli waris pengganti. Selanjutnya temuan dalam aspek yuridis, ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanyar berdasarkan Instruksi Presiden. Selanjutnya, materi muatan tentang ahli waris pengganti pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dengan redaksi yang tidak jelas rumusnya sehingga tujuan perumusannya pun menjadi tidak jelas, narasinya merupakan paradoks yang melahirkan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan ketidakadilan dalam hukum kewarisan di Indonesia.

Untuk mewujudkan rekonstruksi hukum ahli waris pengganti yang berbasis keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka harus dilakukan rekonstruksi hukum. Rekonstruksi tersebut tertuju pada 2 (dua) norma, norma sosial dan norma yuridis. Rekonstruksi norma sosial adalah dengan membumikan norma-norma penggantian ahli waris sebagai wujud keadilan sosial dalam masyarakat muslim Indonesia. Rekonstruksi norma yuridis adalah melakukan penyempurnaan muatan materi pada ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, seperti meniadakan kata "*dapat*" dalam materi ayat (1), kemudian merumuskan materi ayat (2) bahwa ahli waris pengganti mendapatkan separoh dari bagian ahli waris terendah. Kemudian melengkapinya dengan norma-norma baru, seperti menyatakan bahwa ahli waris pengganti tidak dapat menghibab saudara/saudari pewaris dan ahli waris pengganti tidak boleh mendapatkan sisa bagian ketika ada anak dan/atau ayah pewaris.

Kata kunci: *Hukum kewarisan, Ahli waris pengganti, Kompilasi Hukum Islam.*

ABSTRACT

The discussion of this study focused on the consideration of why substitute heirs must be included in inheritance law based on Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law, the problems of substitute heirs law that has not been fair in Inheritance Law based on Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law, the legal consequences of applying the provisions of substitute heirs in inheritance law based on Presidential Instruction No. 1 of 1991 on Compilation of Islamic Law which is not yet fair, and the reconstruction of substitute heirs in inheritance law based on Presidential Instruction Number 1 of 1991 on Compilation of Islamic Law based on the value of justice.

The framework of this study departs from the application of the substitute heirs provisions in the Compilation of Islamic Law in the Religious Courts process in Indonesia, which gave birth to various legal problems such as the large number of differences in interpretation of Article 185 Compilation of Islamic Law regarding substitute heirs, where the editorial is ambiguous and even considered not clear. Multi interpretation of article 185 Compilation of Islamic Law ultimately makes a difference in legal considerations and decisions of Religious Judges in the Religion Court.

This study is a normative legal research that is descriptive analytical, with the paradigm of constructivism. The method of approach to this research is juridical normative and sociological jurisprudence. The source of legal material is Presidential instruction Number 1 of 1991 on Compilation of Islamic Law, and related regulations and other references, then collected by library research techniques.

The findings obtained in this study, namely: in philosophical aspects, the provisions of substitute heirs in the Compilation of Islamic Law do not originate from syafi'iyah Islamic inheritance, the purpose of its formation is only for Religious judges, then epistemology substitute heirs hegemony hegemony of hazairin thoughts, customary law and Dutch civil law, then the limitation of interpretation by the Supreme Court made the provisions of substitute heirs run away. The finding of the sociological aspect is that the mindset of the majority of Indonesian Muslims is based on the syafi'iyah school where this school knows no term substitute heir. Furthermore, the findings in the juridical aspect, substitute heirs in the Compilation of Islamic Law which is based solely on the Presidential Instruction. Furthermore, the material about substitute heirs in Article 185 Compilation of Islamic Law is formulated with editors who are not clear in its formulation so that the purpose of its formulation becomes unclear, the narrative is a paradox that gives rise to legal uncertainty and results in injustice law in Indonesia.

In order to realize legal reconstruction of substitute heirs based on the value of justice in the Compilation of Islamic Law, legal reconstruction must be carried out. The reconstruction is aimed at 2 (two) norms, social norms and juridical norms. Reconstruction of social norms is to ground the norms of substituting heirs as a manifestation of social justice in the Indonesian Muslim community. Juridical norm reconstruction is to make improvements to the material content in paragraph (1) and Paragraph (2) Article 185 Compilation of Islamic Law, such as omitting the word "can" in the material in paragraph (1), then formulating the material paragraph (2) that the substitute heirs get half of the lowest heirs. Then completing it with new norms, such as stating that the substitute heirs cannot block out the brothers/sisters of inheritance owner and substitute heirs may not get the remaining portion when there is a child and/or father of inheritance owner.

Keywords: *Inheritance law, Substitute heirs, Compilation of Islamic Law*